



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2025;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang.../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1774);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);

19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 151);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2025.

Pasal 1

Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun 2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 11 November 2025  
20 Jumadil Awal 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 11 November 2025  
20 Jumadil Awal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 23 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA  
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
 TAHUN 2025.-----

PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
 TAHUN 2025

No	NOMOR	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
1	01/P-Renja-Disdik/2025	Dinas Pendidikan Aceh	
2	02/P-Renja-Dinkes/2025	Dinas Kesehatan Aceh	
3	03/P-Renja-RSUDZA/2025	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin	
4	04/P-Renja-RSJ/2025	BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh	
5	05/P-Renja-RSIA/2025	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	
6	06/P-Renja/PUPR/2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
7	07/P-Renja-Pengairan/2025	Dinas Pengairan Aceh	
8	08/P-Renja-Perkim/2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
9	09/P-Renja-Satpol.PP.WH/2025	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
10	10/P-Renja-BPBA/2025	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
11	11/P-Renja-Dinsos/2025	Dinas Sosial Aceh	
12	12/P-Renja-Naker/2025	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
13	13/P-Renja-DP3A/2025	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
14	14/P-Renja-Pangan/2025	Dinas Pangan Aceh	
15	15/P-Renja-Tanah/2025	Dinas Pertanahan Aceh	
16	16/P-Renja-DRKA/2025	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
17	17/P-Renja-DPMGA/2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
18	18/P-Renja-Dishub/2025	Dinas Perhubungan Aceh	
19	19/P-Renja-Kominsa/2025	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
20	20/P-Renja-Kop.UKM/2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
21	21/P-Renja-DPMP2TA/2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
22	22/P-Renja-Dispora/2025	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	
23	23/P-Renja-Disbudpar/2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
24	24/P-Renja-Arpus/2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
25	25/P-Renja-DPDA/2025	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
26	26/P-Renja-MPA/2025	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
27	27/P-Renja-KKW/2025	Keurukon Katibul Wali Aceh	
28	28/P-Renja-MAA/2025	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
29	29/P-Renja-Dinsyar/2025	Dinas Syariat Islam Aceh	
30	30/P-Renja-MPU/2025	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	
31	31/P-Renja-BMA/2025	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
32	32/P-Renja-BRA/2025	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
33	33/P-Renja-DKP/2025	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
34	34/P-Renja-Tanbun/2025	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	

35	35/P-Renja-Disnak/2025	Dinas Peternakan Aceh	
36	36/P-Renja-DLHK/2025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
37	37/P-Renja-ESDM/2025	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
38	38/P-Renja-Indag/2025	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
39	39/P-Renja-Inspektorat/2025	Inspektorat Aceh	
40	40/P-Renja-Bappeda/2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	
41	41/P-Renja-BPKA/2025	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
42	42/P-Renja-BKA/2025	Badan Kepegawaian Aceh	
43	43/P-Renja-BPSDM/2025	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
44	44/P-Renja-BPPA/2025	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
45	45/P-Renja-Ro.Umum/2025	Biro Umum Setda Aceh	
46	46/P-Renja-Ro.Pemotda/2025	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh	
47	47/P-Renja-Romi/2025	Biro Perekonomian Setda Aceh	
48	48/P-Renja-Ro.Isra/2025	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh	
49	49/P-Renja-Ro.Organ/2025	Biro Organisasi Setda Aceh	
50	50/P-Renja-Ro.Hukum/2025	Biro Hukum Setda Aceh	
51	51/P-Renja-Ro.Adpem/2025	Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh	
52	52/P-Renja-Ro.Adpim/2025	Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	
53	53/P-Renja-Ro.PBJ/2025	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Aceh	
54	54/P-Renja-Sek.DPRA/2025	Sekretariat DPR Aceh	
55	55/P-Renja-Kesbangpol/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF